

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(L K j I P)

Tahun 2024

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL.KAPTEN ANWAR SASTRO NO. 1251 PALEMBANG
TELP. 0711-352302 FAX. 0711-361381

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam indikator kinerja utama (IKU) tahun 2019 - 2023 yang telah direviu dan menjadi tugas dan fungsi yaitu:

“Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air”.

LKjIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk upaya dalam mencapai VISI Sumatera Selatan 2019-2023 yang dirumuskan sebagai,

“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA ”

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Indikator Tujuan yang menjadi tugas Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Persentase Kawasan Sumber Daya Air Yang Terkelola Dengan Baik

Secara keseluruhan tingkat capaian pelaksanaan anggaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan pagu anggaran dimana pada awal Tahun Anggaran (TA) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 90.584.096.083** yang terdiri atas 2 Program Kinerja, yaitu :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp29.635.825.462,-
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.184.722.113,-

Total Pagu Anggaran Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan setelah **perubahan** yang bersumber dari dana APBD-P Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp97.270.421.575**

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp 29.852.701.252,-
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA), dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp 67.634.596.113,-

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan memiliki Tugas Pembantuan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 21.557.010.000,-** yang terdiri atas :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Kegiatan Irigasi Permukaan Rp. 5.584.955.000,-
- Kegiatan Jaringan Irigasi Rawa Rp.14.577.515.000,-
- Program dukungan manajemen Rp.1.394.540.000,-

Dimana pencapaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan RPJMD dan RENSTRA tahun 2022 – 2023 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/ IKK	Realisasi Capaian 2022	Target Capaian 2023	Realisasi Capaian s.d. Triwulan IV 2023	Rasio Capaian s.d. Triwulan IV 2023 (%)
1	Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Terairi	Ha	32.855	32.899	32.855	32.649	99,37
2	Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi	Ha	13.000	11.714	13.000	13.289	102,22
3	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	Ha	5.200	5.153	5.200	5.447	104,75
4	Volume Ketersediaan Air Baku	M3	65.000	311.500	65.000	430.942	662,99
5	Presentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	56,07	54,66	56,07	56,44	100,65
6	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	100	78,26	100	101,02	101,02
7	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	11.000	9.500	11.000	10.855	98,68

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan pencapaian keuangan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan permasalahan dan kendala yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan kebijakan dan solusi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Dokumen Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat membantu sebagai bahan evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) tahun anggaran 2019-2023 serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi v

 BAB 1 Pendahuluan 1

 1.1 Struktur Organisasi 1

 1.2 Tugas dan Fungsi 4

 1.3 Isu-isu Strategis 4

 1.4 Sumber Daya 4

 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana..... 5

 1.6 Keuangan 6

 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..... 7

 BAB 2 Perencanaan & Perjanjian Kinerja..... 8

 2.1 Perencanaan Kinerja 8

 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 9

 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 10

 2.2 Perjanjian Kinerja 12

 BAB 3 Akuntabilitas Kinerja..... 15

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 15

 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun SebelumnyaError! Bookmark not defined.

 3.3 Realisasi Anggaran 20

 3.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah..... 22

 BAB 4 Penutup..... 28

 4.1 Kesimpulan..... 28

 4.2 Tindak Lanjut 29

LAMPIRAN

BAB 1 Pendahuluan

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Fungsi dan Tugas
- 3. Isu Strategis
- 4. Keadaan Pegawai
- 5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 6. Keuangan
- 7. Sistematika LKj IP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan diteruskan dengan Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 dan Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Adapun Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah :

“MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE”

1.1 Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Pimpinan : Kepala
- 2) Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
- 3) Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian jabatan pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan dibawah ini :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Rekayasa Teknik
 - a. Seksi Survei
 - b. Seksi Desain Irigasi dan Rawa
 - c. Seksi Desain Sungai dan Danau
- 4. Bidang Konstruksi
 - a. Seksi Konstruksi Irigasi dan Rawa

- b. Seksi Konstruksi Sungai dan Danau
 - c. Seksi Tata Teknik
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan :
- a. Seksi Operasi
 - b. Seksi Pemeliharaan
 - c. Seksi Penanggulangan Darurat
6. Bidang Bina Manfaat :
- a. Seksi Sarana Teknik
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Seksi Kerjasama

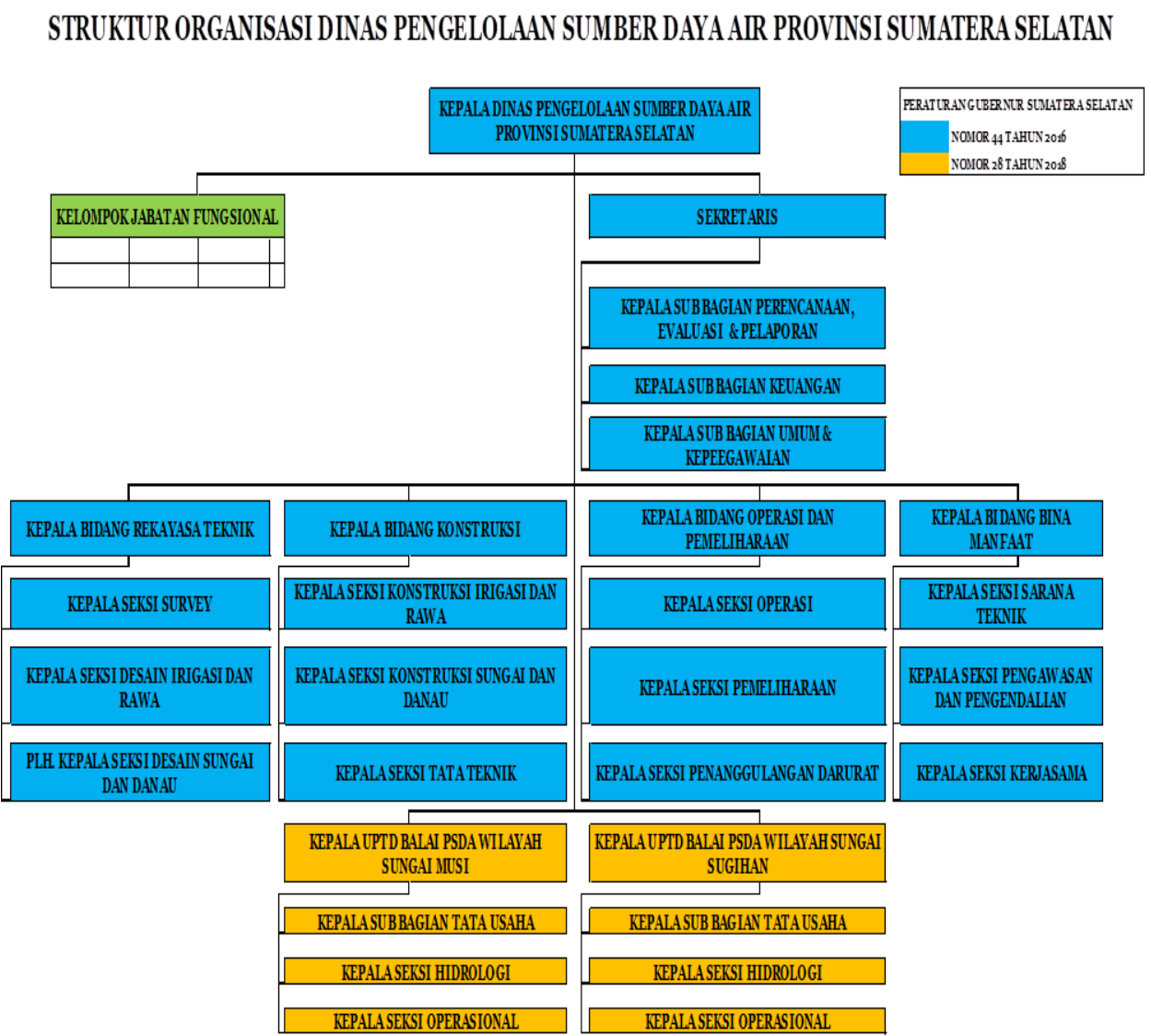
Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Musi dan Sugihan Adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Seksi Hidrologi
 - Kepala Seksi Operasional
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kepala Seksi Hidrologi
 - Kepala Seksi Operasional

Terkait dengan tugas dan struktur organisasi perangkat daerah tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

- Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- Penyelenggaraan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan sumber daya air meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manfaat;
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas PSDA;
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Berikut bagan struktur organisasi kepegawaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (gambar I.1)



1.2 Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.07 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.89, tambahan Lembaran Negara No.4741), maka pembentukan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan No.38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.2 Seri D) dan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan resmi berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tetap memiliki satu (1) Sekretariat, empat (4) bidang dan dua (2) Balai/UPTD, namun beberapa bidang memiliki Tupoksi yang berbeda dari sebelumnya.

1.3 Isu-isu Strategis

Strategi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan/anggaran.

1.4 Sumber Daya

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 95 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2024

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)	Pria	Wanita
1	Jabatan Struktural	25	23	2
2	Jabatan Fungsional Umum	68	35	33
JUMLAH		93	60	37

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2024

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)	Pria	Wanita
1	Golongan IV	8	8	1
2	Golongan III	68	40	27
3	Golongan II	17	10	7
4	Golongan I	-	-	-
JUMLAH		95	58	35

Tabel I.3 Jumlah Pegawai ASN Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Pria	Wanita
1	Pasca Sarjana	21	17	4
2	Sarjana	46	27	19
3	Diploma IV	-	-	-
4	Diploma III	14	5	9
5	SLTA /sederajat	11	8	3
6	SLTP/sederajat	-	-	-
7	SD/sederajat	-	-	-
JUMLAH		93	57	35

Tabel I.4 Jumlah Pegawai ASN Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2024

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	58
2	Wanita	35
JUMLAH		95

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Guna mendukung fungsi manajemen pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 3.375.578 M2 yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Bangunan Kantor : 3.228,75 M2
- Tanah Jaringan/Saluran : 178.438 M2
- Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Tanggul : 18.053 M2
- Tanah Rawa : 3.341.620,200 M2
- Tanah Waduk : 2.336 M2
- Tanah Non Persil Lainnya : 10.000 M2

Tanah Jaringan/Saluran terletak di Lempuing Kab. OKU Timur Sumatera Selatan. Tanah tersebut masih dalam proses pembuatan sertifikat.

Tanah kosong terletak di jalan Ade Irma Nasution No. 10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 3.529 M2 yang terletak diatas tanah seluas 3.228,75 M2 di Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan senilai Rp. 5.551.173.600,-

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari Alat-alat kantor/Rumah Tangga, Alat Studio serta Perangkat Komputer yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 22 buah yang terdiri dari 2 (Dua) buah Jeep Mitsubishi Pajero Sport, 7 (Tujuh) buah Minibus Toyota Kijang Innova J M/T, 1 (satu) buah Toyota Kijang Innova E M/T, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Hilux, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Kijang Innova Luxury V, 5 (lima) buah Isuzu/grand touring, 3 (tiga) unit Excavator dan 1 (Satu) Unit dump Truck.

Nilai kelompok barang aset yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kelompok Barang Aset

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	26.173.825.230
2.	Peralatan dan Mesin	23.820.182,190
3.	Gedung dan Bangunan	6.189.426.600
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	907.814.474,41
5.	Aset Tetap Lainnya	32.446.793,75

1.6 Keuangan

Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh anggaran belanja awal yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 100.872.984.300,-**, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 53.090.583.534,-**

» *Belanja Pegawai* : Rp. 16.118.594.000,-

» *Belanja Barang dan Jasa* : Rp. 36.971.989.534,-

Belanja Modal : **Rp. 47.782.400.766,-**

Dan mengalami perubahan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 100.254.930.000,-**, yang terdiri dari;

Belanja Operasi : **Rp. 54.755.021.734,-**

» *Belanja Pegawai* : Rp. 14.674.587.000,-

» *Belanja Barang dan Jasa* : Rp. 40.080.434.734,-

Belanja Modal : **Rp. 45.499.908.266,-**

Belanja Operasi APBD terdiri atas 02 Program dan 09 Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan terdapat Tugas Pembantuan (TP) yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2023 sebesar,

Rp. 21.557.010.000,-. Terdiri atas:

Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program dukungan manajemen

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

- Kegiatan Jaringan Irigasi Permukaan : Rp. 5.584.955.000,-
- Kegiatan Jaringan Irigasi Rawa : Rp. 14.577.515.000,-
- Program dukungan manajemen : Rp. 1.394.540.000,-

1.7 **Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan- dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat *sasaran utama yang ingin diraih* instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana *kaitannya dengan capaian visi dan misi* Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023. Renstra merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023 sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. RPJMD 2019-2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Evaluasi pembangunan ini dilakukan pada tahun 2021 disebabkan disebabkan oleh terjadinya perkembangan kondisi daerah secara signifikan yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah serta terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi apakah perubahan RPJMD dapat dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. uraian yang disampaikan agar:

- a. Mempedomani format Sistematika Renstra PD (terlampir);
- b. Mengacu pada Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD tahun 2019-2023,
- c. Mempertimbangkan isu dan permasalahan terkini, seperti dampak Pandemi COVID-19, dll;
- d. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru, antara lain PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No.18 Tahun 2020, Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, Permenpan RB no. 88 tahun 2021;
- e. Dilengkapi indikator dan target kinerja yang terukur;
- f. Mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional.

menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 yang telah

ditetapkan dalam SK Kepala OPD No.610/432/SK/DPSDA/2022 tentang revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, perubahan perlu dilakukan untuk rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan perubahan kedua. Hasil perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 yang pertama akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan akhir tahun RPJMD.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen melalui Tujuan dan Sasaran yang merupakan panduan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 dan PerMen PAN RB No. 53 tahun 2014 tentang panduan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta target yang ditetapkan dan kesesuaian dengan Indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019 - 2023.

Untuk mencapai visi Sumatera Selatan 2019-2023 yang dirumuskan sebagai “SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA” , oleh karena itu Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan harus mengacu untuk mewujudkan visi tersebut.

Dalam upaya pencapaian menuju Visi diatas, terdapat 5 (lima) Misi yang harus diemban, yaitu :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi Pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun dipendesaan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif;
4. Membangun dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pendalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamais & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius;

Untuk mewujudkan misi tersebut maka dibutuhkan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan

2. Maju Akses Energi
3. Maju Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas dari Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Air. Mengelola dalam pengertian luas yaitu ; merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara prasarana Sumber Daya Air sesuai dengan prinsip SIDCOM (Survey Investigation Design Construction Operation And Maintenance).

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ini dimaksudkan sebagai kegiatan analisis yang hasilnya digunakan untuk tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan padanya, untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih jelas, terinci serta terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
3. Menjelaskan tentang pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bidang dan mengacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020/2021 telah menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama organisasi perangkat daerah yang mengacu pada hasil review bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana telah memperbaiki Pohon Kinerja / Cascading yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah. Terkait hal tersebut maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan tujuan yaitu :

“MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR”

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis beserta indikator dan cara pencapaian yang tertuang pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2023, penetapan target kinerja dari setiap Indikator Kinerja telah terintegritas dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, penjelasannya sebagaimana tabel berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terlaksana	1.1 Meningkatnya Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	1.1.1 Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Terairi	Luas Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik
			1.1.2 Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi	Luas Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik
			1.1.3 Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif Dalam Kondisi Baik
			1.1.4 Volume Ketersediaan Air Baku	Volume Tampungan Air Baku yang Tersedia
			1.1.5 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$
		1.2 Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air	1.2.1 Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Banjir Yang Ditangani}}{\text{Luas Daerah Rawan Banjir Provinsi Sumatera Selatan}} \times 100\%$
			1.2.2 Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Luas Kawasan Sekitar Sungai yang Ditangani

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Dimana Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya air di Sumatera Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Arah Kebijakan dan Program - Program Strategis. Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun arah kebijakan dan program-program strategis ini adalah multidimensional dan integratif.

Adapun Sasaran Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Meliputi :

1. Mengoptimalkan & Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi, Rawa dan Sungai.
2. Mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, rawa dan sungai.
3. Memperbaiki dan rekonstruksi kerusakan insfrastruktur akibat banjir.
4. Mengembangkan sistem informasi teknologi / data base Sumber Daya Air.
5. Menyediakan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

- 6. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan sumber daya aparatur.
- 7. Meningkatkan Kinerja SDM melalui sarana dan prasarana pendukung.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah diselaraskan pada Renstra, IKU/IKD, dan anggaran atau DPA serta Pohon kinerja/Cascading dan merupakan komitmen untuk mencapai target indikator sasaran yang telah diuraikan diatas. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	1.1.1 Luas Daerah Irigasi Permukaan yang terairi	32.855 Ha
		1.1.2 Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi	13.000 Ha
		1.1.3 Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	5.200 Ha
		1.1.4 Volume Ketersediaan Air Baku	65.000 M ³
		1.1.5 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	56,07 %
2.	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air	2.1.1 Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	100,00 %
		2.1.2 Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	11.000 Ha

Tabel 2..2 Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Dimana keterkaitan antara Tujuan, Sasaran pada RPJMD dengan RENSTRA, IKD dengan Program/Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Perjanjian Kinerja T.A 2023 dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAH	1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	2 Meningkatnya integritas pemerintah daerah	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Besar Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1 Maju Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
		Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
		Pembangunan Polder / Kolam Retensi
		Peningkatan Polder / Kolam Retensi
		Normalisasi / Restorasi Sungai
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Musi Kewenangan Provinsi
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
		Operasional dan Pemeliharaan Sungai
	2 Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
		Operasional Unit Pengelola Irigasi (IPDMIP-Loan ADB)

Tabel II.2 Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terhadap Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja*
2. *Realisasi Anggaran*

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta implementasi pencapaian sasaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Faktor Penghambat / Pendorong
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Meningkatkan Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Luas Daerah irigasi Permukaan yang Terairi	Ha	28.795	28.115	30.595	29.214	32.095	29.819	31.355	32.899	32.855	32.649	Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada RPJMD
2		Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi	Ha	5.700	2.878	8.700	3.902	11.700	7.768	10.500	11.714	13.000	13.289	
3		Luas Daerah irigasi partisipatif	Ha	2.009	1.928	4.209	3.989	6.446	5.000	5.100	5.153	5.200	5.447	
4		Volume Ketersediaan Air Baku	M3	15.000	15.000	25.000	35.700	40.000	45.000	55.000	311.500	65.000	430.942	
5		Presentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	40,09	36,16	47,78	40,75	55,18	46,77	51,57	54,66	56,07	56,44	
6	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (Permendagri 18)	%	35,56	39,17	40,74	47,89	45,55	58,21	79,11	78,26	100,00	101,00	
7		Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	0	1.200	2.200	6.655	3.700	8.995	9.500	9.500	11.000	11.103	

Tabel III.2 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi pencapaian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK). Adapun pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini telah disesuaikan dengan Indikator kinerja yang menjadi tolak ukur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk capaian kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirinci pada tabel capaian berikut beserta target dan realisasi Kinerja sesuai dengan RENSTRA (rev) tahun anggaran 2019-2023;

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				TAHUN 5 (2023)	TAHUN 5 (2023)	TAHUN 5 (2023)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	Ha	32.855	34.294	82,55
		Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	Ha	13.000	13.289	26,84
		Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	Ha	5.200	5.447	5,98
		Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	1,65	1,35	1,35
2	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	11.000	10.819	98,35
		Volume Ketersediaan Air Baku	M³	65.000	474.156	729,47
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	100,00	97,24	97,24

Adapun penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi” Untuk perhitungan indikator tersebut juga didukung melalui indikator kinerja perangkat daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Luas daerah irigasi permukaan yang terairi, dengan target 32.855 Ha dan realisasi 32.649 ha.
 - Luas Daerah irigasi rawa yang terairi dengan target 13.000 ha dan realisasi 13.289 Ha.
 - Luas Irigasi Partisipatif, dengan target 5.200 Ha dan realisasi 5.447 ha.
 - Volume ketersediaan air baku dengan target 65.000 M3 dan realisasi 430.942 M3.
 - Memiliki indikator tolak ukur utama berupa Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 51,57% dan dengan realisasi 54,66%.
2. Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air”. Memiliki indikator tolak ukur utama berupa **Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Longsor** dengan target pada tahun 2023 yaitu **100%** dan dengan realisasi **100,00%**. Untuk perhitungan indikator tersebut juga didukung melalui indikator kinerja kunci perangkat daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor dengan target 11.000 Ha dan realisasi yang telah dicapai pada tahun anggaran 2023 sebesar 11.103 Ha, dengan persentase capaian sebesar 100,93%.
 - Luas Kawasan Permukiman Bebas bencana banjir dengan target 47.842 Ha dan realisasi yang telah dicapai pada tahun anggaran 2023 sebesar 48.329 Ha dengan persentase capaian sebesar 101,02 %.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir. Adapun Perbandingan target dan Realisasi Kinerja serta capaiannya dapat dijelaskan berikut ini :

- Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi” Memiliki indikator tolak ukur utama berupa Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi dengan target pada tahun 2022 sebesar 51,57% dan dengan realisasi 56,07 %, serta capaian 54,66%.
- Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air”. Dengan target pada tahun 2023 yaitu **100%** dan dengan realisasi **100,00%**. Dimana realisasi tersebut lebih baik pada tahun sebelumnya tahun 2022 dengan target 79,11, Namun untuk realisasi yang tercapai sebesar 78,28. Hal tersebut menjadi tolak ukur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan menganalisa dan melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan telah ditindak lanjuti pada tahun anggaran 2023.

Perbandingan target, realisasi,dan capaian tahun berjalan tahun 2023 terhadap realisasi tahun sebelumnya tahun 2022 tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	Ha	31.355	32.855	32.899	34.294	79,20	82,55
		Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	Ha	10.500	13.000	11.714	13.289	23,66	26,84
		Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	Ha	5.100	5.200	5.153	5.447	5,66	5,98
		Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	51,57	56,07	54,66	58,24	54,66	58,24
2	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	9.500	11.000	9.500	10.819	86,36	98,35
		Volume Ketersediaan Air Baku	M³	55.000	65.000	311.500	474.156	479,23	729,47
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	79,11	100,00	78,26	97,24	78,26	97,24

Berdasarkan Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengantahun lalu akan disajikan analisis pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap realisasi capaian indikator kinerja dapat dijelaskan melalui tabel pada halaman berikut ini;

**Pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		Faktor Penghambat / Pendorong
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Luas Daerah irigasi Permukaan yang Terairi	Ha	28.795	28.115	30.595	29.214	32.095	29.819	31.355	32.899	Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada RPJMD
2		Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi	Ha	5.700	2.878	8.700	3.902	11.700	7.768	10.500	11.714	
3		Luas Daerah irigasi partisipatif	Ha	2.009	1.928	4.209	3.989	6.446	5.000	5.100	5.153	
4		Volume Ketersediaan Air Baku	M3	15.000	15.000	25.000	35.700	40.000	45.000	55.000	311.500	
5		Presentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	40,09	36,16	47,78	40,75	55,18	46,77	51,57	54,66	
6	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (Permendagri 18)	%	35,56	39,17	40,74	47,89	45,55	58,21	79,11	78,26	
7		Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	0	1.200	2.200	6.655	3.700	8.995	9.500	9.500	

Adapun penjelasan tabel diatas sebagai berikut :

1. Untuk Realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, dapat diuraikan sebagai berikut :
- Luas daerah irigasi permukaan yang terairi pada tahun 2022, dengan target 31.355 Ha dan realisasi 32.889 Ha dimana realisasi tahun 2023 sebesar 32.649 Ha

- Luas Daerah irigasi rawa yang terairi pada tahun2022 dengan target 10.500 ha dan realisasi 11.700 Ha dimana realisasi tahun 2023 sebesar 13.289 Ha

- Luas Irigasi Partisipatif, dengan target tahun 2022 dengan target 5.100 Ha dan realisasi 5.153 Ha. dimana realisasi tahun 2023 sebesar 5.447 Ha.

- Volume ketersediaan air baku dengan target tahun 2022 55.000 M3 dan realisasi 45.000 M3. Dengan realisasi tahun 2023 realisasi 430.942 M3

Sasaran meningkatnya kinerja pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Memiliki indikator tolak ukur utama berupa Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan target pada tahun **2022** sebesar **51,57%** dan dengan realisasi **54,66%**.

2. Sasaran meningkatnya kinerja pengendalian daya rusak air. Memiliki indikator tolak ukur utama berupa Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dengan target pada tahun **2022** sebesar **78,42%** dan dengan capaian Untuk perhitungan indikator tersebut juga didukung malalui indikator kinerja :
- Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor pada tahun 2022 dengan target 9.315 Ha dan realisasi 9.500 Ha dan realisasi pada tahun2023 11.103 Ha.

Untuk hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Akhir Desember pada OPD PSDA Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

Realisasi Belanja Perangkat Daerah Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan ;

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)			Fisik (%)
			Target	Realisasi	Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(2) *100%	(6)	(7)
Total Belanja	104.963.519.449	94.714.414.596	100,00	90,24	100,00	98,61
Belanja Operasi	56.886.375.506	51.610.998.968	100,00	90,73	100,00	98,97
- Belanja Pegawai	14.913.955.000	13.602.875.383	100,00	91,21	100,00	100,00
- Belanja Barang dan Jasa	41.972.420.506	38.008.123.585	100,00	90,55	100,00	98,61
Belanja Modal	48.077.143.943	43.103.415.628	100,00	89,65	100,00	98,18

- a) Realisasi Total Belanja
- Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 94.714.414.596 atau 90,24% dan realisasi fisik 98,61%.

- b) Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 51.610.998.968 atau 90,73% dan realisasi fisik 98,97%.
- c) Realisasi Belanja Modal
Realisasi Keuangan Belanja Modal Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 43.103.415.628 atau 89,65% dan realisasi fisik 98,18%.

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	29.756.810.000,00	98,05	98,05
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	27.904.710.000,00	98,95	98,95
Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara	8.419.104.000,00	99,33	99,33
Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	19.485.606.000,00	98,78	98,78
Program Dukungan Manajemen	1.852.100.000,00	84,48	84,48

Pagu : Rp. 29.756.810.000,-
Realisasi : Rp. 29.175.900.000,-
Progres Fisik : 98,05%
Progres Keuangan: 98,05%

3.2 Realisasi Anggaran

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Akhir Desember pada OPD PSDA Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

A. Realisasi Belanja Perangkat Daerah Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			Target	Realisasi	Nilai Realisasi Terhadap Target	Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Nilai Realisasi Terhadap Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(2) *100%	(6) = (5)/(4) *100%	(7)	(8)	(9) = (8)/(7) *100%
Total Belanja	100.254.930.000	81.817.921.810	100,00	81,61	81,61	100,00	98,62	98,62
Belanja Operasi	54.755.021.734	45.364.524.775	100,00	82,85	82,85	100,00	97,99	97,99
-Belanja Pegawai	14.674.587.000	13.147.173.643	100,00	89,59	89,59	100,00	94,14	94,14
-Belanja Barang dan Jasa	40.080.434.734	32.217.351.132	100,00	80,38	80,38	100,00	99,40	99,40

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			Target	Realisasi	Nilai Realisasi Terhadap Target	Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Nilai Realisasi Terhadap Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(2) *100%	(6) = (5)/(4) *100%	(7)	(8)	(9) = (8)/(7) *100%
Belanja Modal	45.499.908.266	36.453.397.035	100,00	80,12	80,12	100,00	99,37	99,37

Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 81.817.921.810 atau 81,61% dan realisasi fisik 98,62%.

Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 45.364.524.775 atau 82,85% dan realisasi fisik 97,99%.

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 36.453.397.035 atau 80,12% dan realisasi fisik 99,37%.

B. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	21.557.010.000,00	96,82	100,00
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	20.162.470.000,00	98,46	100,00
Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara	5.584.955.000,00	97,32	100,00
Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	14.577.515.000,00	98,89	100,00
Program Dukungan Manajemen	1.394.540.000,00	73,19	100,00

Pagu

: Rp. 21.557.010.000,-

Realisasi

: Rp. 20.872.022.000,-

Progres Keuangan

: 96,82%

Progres Fisik

: 100,00%

C. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan RPJMD dan RENSTRA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2023:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/ IKK	Realisasi Capaian 2022	Target Capaian 2023	Realisasi Capaian s.d. Triwulan IV 2023	Rasio Capaian s.d. Triwulan IV 2023 (%)
1	Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Terairi	Ha	32.855	32.899	32.855	32.649	99,37
2	Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi	Ha	13.000	11.714	13.000	13.289	102,22
3	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	Ha	5.200	5.153	5.200	5.447	104,75
4	Volume Ketersediaan Air Baku	M3	65.000	311.500	65.000	430.942	662,99
5	Presentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	56,07	54,66	56,07	56,44	100,65
6	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	100	78,26	100	101,02	101,02
7	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	11.000	9.500	11.000	10.855	98,68

Tabel III.3.3 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Analisis dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung sektor Pertanian dan sektor pengendalian bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan Sumber Daya Air pada sektor pertanian berupa pengelolaan Jaringan Irigasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pada sektor pertanian atau ketahanan pangan, Sehingga dengan adanya jaringan irigasi yang terairi yang berkelanjutan [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana.

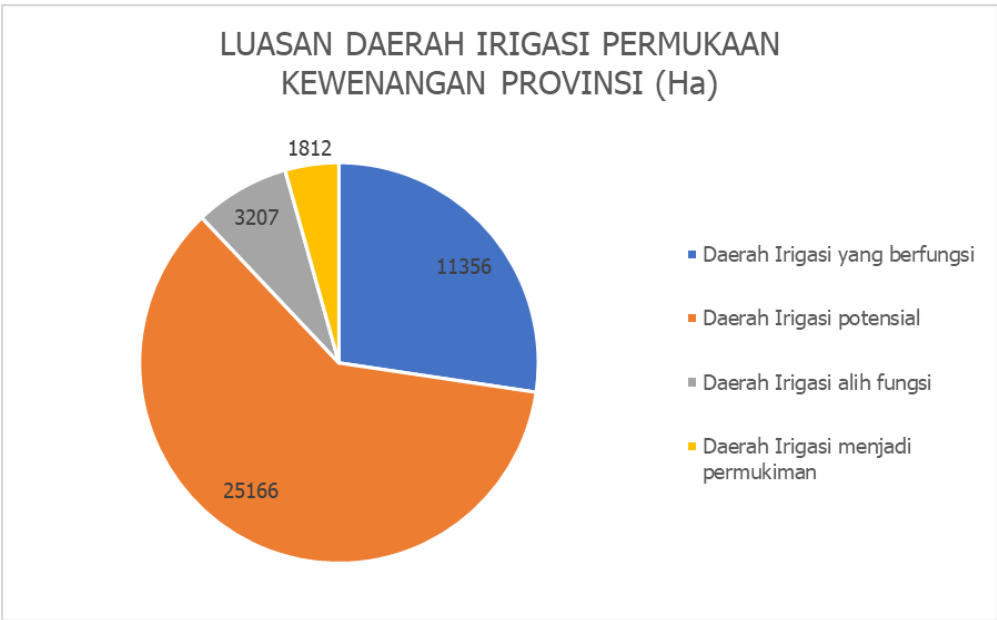
Pertumbuhan pembangunan sektor Pertanian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari Provinsi Sumatera Selatan merupakan Lumbung pangan Nasional nomor 5 di Indonesia.

Potensi sumber daya air permukaan yang berasal dari 9 (sembilan) sungai besar dan kecil dibagi dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Musi, SWS Sugihan dan SWS Banyuasin dengan luas lebih kurang 94.028 KM2 dan kapasitas 103.589 x 106 M3. Potensi tersebut baru

dimanfaatkan 4,11% atau 4.966 x 106 M3 untuk kebutuhan pertanian, air minum, industri, penggelontoran, perikanan dan peternakan, sementara sisanya 115.684 x 106 M3 atau 98,59% belum dimanfaatkan.

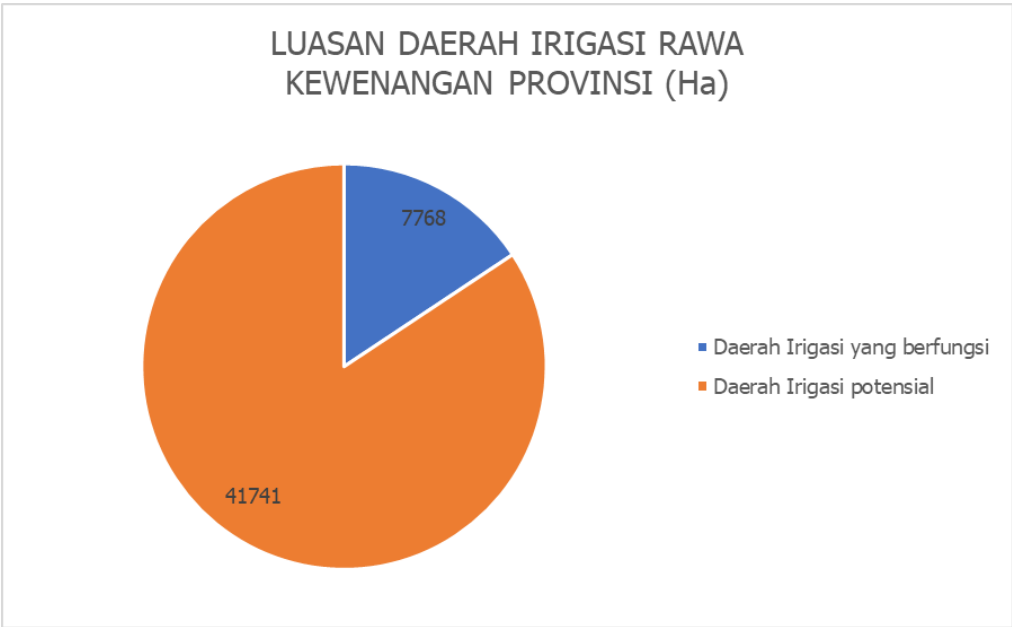
Tabel Potensi lahan irigasi dan rawa yang dapat dan telah dikembangkan menjadi persawahan atau pertanian seluas 976.133 Ha (Gambar 2 dan Gambar 3), yang terdiri dari :

- a. Daerah Irigasi Permukaan seluas : 41.541 Ha
 - Daerah Irigasi yang berfungsi : 11.356 Ha
 - Daerah Irigasi Potensial : 25.166 Ha
 - Daerah Irigasi Alih Fungsi : 3.207 Ha
 - Daerah Irigasi menjadi Permukiman : 1.812 Ha



Gambar 1 : Diagram Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumsel

- b. Daerah Irigasi Rawa seluas : 49.509 Ha
 - Daerah Irigasi Rawa Potensial : 41.741 Ha
 - Daerah Irigasi Rawa Berfungsi : 7.768 Ha



Gambar 2 : Diagram Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Sumsel

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat didefinikasikan beberapa isu permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut :

- Kerusakan Infrastruktur Jaringan Irigasi Permukaan penunjang pertanian terus meningkat
- Bertambahnya Alih fungsi lahan sawah ke non sawah
- Ketersediaan air baku yang menurun (dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
- Banjir, longsor/erosi dan sedimentasi
- Terjadinya perubahan iklim global yang ekstrim
- Maraknya pembakaran hutan di daerah rawa gambut
- Masih besarnya potensi lahan sub optimal yang ada di Sumatera Selatan yang belum tersentuh/dikembangkan terutama pada Daerah Irigasi Rawa.

Pelaksanaan tindak lanjut dalam perbaikan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Kedepan dituangkan dalam *Rencana Aksi* berupa Peningkatan ketahanan pangan sebagai daerah Lumbung Pangan Nasional dan Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan longsor. Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang diterjemahkan kedalam Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi Daerah Irigasi Permukaan, Daerah Irigasi Rawa dan Daerah Irigasi partisipatif.
2. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Bencana Banjir.
3. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Longsor.
4. Peningkatan Jumlah ketersediaan Air Baku untuk Pertanian.

Adapun analisis pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini;

**Pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra PD Tahun Ke-				
						TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)	TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)*	TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1.	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	-	32.855	-	Ha	28.795	30.595	29.819	31.355	32.855	28.115	29.214	30.398	32.899	34.294	67,68	70,33	73,18	79,20	82,55
2.	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	-	13.000	-	Ha	5.700	8.700	7.768	10.500	13.000	2.878	3.902	11.714	11.714	13.289	5,81	7,88	23,66	23,66	26,84
3.	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	-	5.200	-	Ha	2.009	4.209	5.000	5.100	5.200	1.928	3.989	5.153	5.153	5.447	2,12	4,38	5,66	5,66	5,98
4.	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	-	11.000	-	Ha	1.200	2.200	8.995	9.500	11.000	-	6.655	8.995	9.500	10.819	-	60,50	81,77	86,36	98,35
5.	Volume Ketersediaan Air Baku	-	65.000	-	M³	15.000	25.000	45.000	55.000	65.000	24.000	35.700	35.700	311.500	474.156	36,92	54,92	54,92	479,23	729,47
6.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	-	100,00	-	%	35,56	40,74	58,21	79,11	100,00	39,17	47,89	71,74	78,26	97,24	39,17	47,89	71,74	78,26	97,24
7.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	-	56,07	-	%	40,09	47,78	46,77	51,57	56,07	36,16	40,75	51,91	54,66	58,24	36,16	40,75	51,91	54,66	58,24

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui target kinerja pada periode lima tahun yang lalu ada beberapa target yang tercapai sesuai dengan target. Pencapaian melebihi 100% pada indikator kinerja Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Terairi, Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi, Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi, Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Oleh Infrastruktur pengendalian Banjir dan Longsor, Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif Yang Terairi, Volume Ketersediaan Air Baku, dan Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan / penyempurnaan dan / atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan /meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu menambah luas areal tanam dan / atau dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP). Dari target yang sudah ditetapkan diakhir periode RPJMD dan RENSTRA 2019-2023 sebesar **32.855 Ha**, capaian kinerja yang terealisasi adalah **34.294 Ha**.
- Pola pengembangan secara bertahap adalah cara yang paling tepat dan sudah dibuktikan dalam prakteknya selama ini pada pengembangan lahan rawa khususnya untuk pertanian. Kebanyakan lahan rawa masih berada pada tahap pengembangan awal, khususnya bila ditinjau dari segi kinerja pelayanan prasarana pengairannya. Dari target yang sudah ditetapkan diakhir periode RPJMD dan RENSTRA 2019-2023 sebesar **13.000 Ha**, capaian kinerja yang terealisasi adalah **13.289 Ha**.
- Terjadinya serangkaian kerusakan atau bencana akibat daya rusak air yang selalu terulang setiap tahunnya, menuntut upaya yang lebih besar untuk mengantisipasinya dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin. Luas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan longsor selama pelaksanaan RPJMD dan RENSTRA tahun 2019-2023 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **58.842 Ha** untuk penanganan Kawasan prioritas dalam pengendalian bencana banjir dan longsor sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.127/KPTS/DPSDA/2021. Dimana dapat diuraikan sebagai berikut ;
 - Dari target yang sudah ditetapkan diakhir periode RPJMD dan RENSTRA 2019-2023 sebesar **11.000 Ha**, capaian kinerja yang terealisasi adalah **10.819 Ha**.
 - Dari target yang sudah ditetapkan diakhir periode RPJMD dan RENSTRA 2019-2023 sebesar **47.842 Ha**, capaian kinerja yang terealisasi adalah **46.542 Ha**.

Target yang telah direncanakan tersebut belum sesuai dengan capaian yang diharapkan.

- Luas kewenangan irigasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 41.541 Ha untuk daerah irigasi permukaan, 49.509 Ha untuk daerah irigasi rawa dengan total luas kewenangan daerah irigasi sebesar **91.050 Ha** sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2015. Dari target yang sudah ditetapkan sebesar **56,07%** atau seluas **51.055 Ha** selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah **58,24%** atau seluas **53.030 Ha**. Realisasi tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar **103,88%**.
- Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada Kawasan yang terkena dampak banjir, hasil pembangunan yang telah dilakukan antara lain:
 - Revitalisasi danau

- Pembangunan embung
 - Biopori
 - Pembangunan perkuatan tebing
- Dari target yang sudah ditetapkan diakhir periode RPJMD dan RENSTRA 2019-2023 sebesar **65.000 m³**, capaian kinerja yang terealisasi adalah **474.156 m³**. Realisasi tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar **729,47 %**.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan akhir dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019 - 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan konstruksi yang sudah direncanakan di triwulan I dan II dan akan ditindaklanjuti dengan Melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiaptan dengan melakukan percepatan di lapangan sehingga penyelesaian kegiatan tepat waktu. Selain hal tersebut ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator, hal tersebut diantaranya ;

1. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada RPJMD. Dana yang tersedia masih dianggap kurang untuk memelihara daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumsel agar kondisi jaringan Irigasi optimal.
2. Cuaca buruk dan gangguan alam berupa bencana banjir bandang di beberapa kabupaten (Kab. Lahat, Kab. OKU Selatan) menyebabkan kerusakan bangunan saluran dan bendung dimana salah satu Daerah Irigasi (D.I) yaitu pada D.I Air Mulak Kab. Lahat, D.I Air Gohong, D.I Air Pangi dan beberapa Daerah Irigasi permukaan lainnya sehingga mengurangi luas Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang terairi.
3. Provinsi Sumsel tidak memiliki kewenangan sungai, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015, sehingga ketika akan melakukan kegiatan pengendalian banjir harus melakukan konfirmasi kepada BBWSS VIII sebagai pemegang kewenangan sungai di Provinsi Sumsel.
4. Kondisi alam di Provinsi Sumsel yang semakin menurun disebabkan antara lain berkurangnya luas hutan lindung yang mengakibatkan sungai-sungai yang berada di daerah sekitar mengalami bencana hampir setiap tahun (5 tahun terakhir) walaupun dalam kondisi musim hujan yang normal (tidak ekstrim).

Dapat disampaikan disini selain beberapa faktor penghambat diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam keberhasilan pencapaian, diantaranya ;

1. Daerah Irigasi Rawa yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam pembukaan lahan pertanian yang baru.
2. Daerah Irigasi Teknis/ Permukaan yang mempunyai dampak cukup besar dalam menopang penghidupan masyarakat/ petani baik dalam penyediaan air untuk sehari-hari maupun lahan pertanian apabila kondisi irigasi tersebut optimal.

Sasaran dalam Agenda Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas berupa Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisihery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

4.2 Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut dalam perbaikan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Kedepan dituangkan dalam Rencana Aksi berupa Peningkatan ketahanan pangan sebagai daerah Lumbung Pangan Nasional dan Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan longsor. Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang diterjemahkan kedalam Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi Daerah Irigasi Permukaan, Daerah Irigasi Rawa dan Daerah Irigasi partisipatif.
2. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Bencana Banjir.
3. Peningkatan Jumlah Kawasan Bebas Longsor.
4. Peningkatan Jumlah ketersediaan Air Baku untuk Pertanian.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mendukung Prioritas Daerah (PD) dalam **"Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana"** dengan melaksanakan Program Prioritas Daerah (PPD) berupa :

- 1) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Kedaulatan Pangan, serta
- 2) Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja baik bagi perangkat daerah pemangku maupun stakeholder terkait.

Palembang, 25 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Ir. H. HERWAN, MM.
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660601 199003 1 004